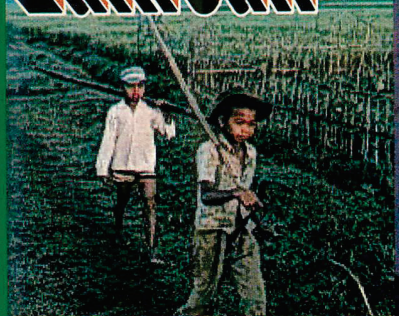
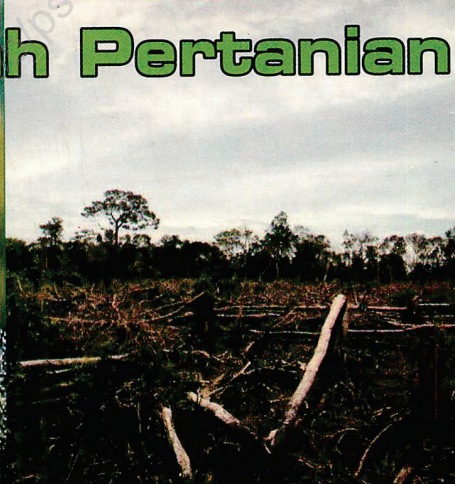


Lukisan



KEMISKINAN

di Ranah Pertanian



Valeriana Darwis



Handwritten signature

Valeriana Darwis

Lukisan
KEMISKINAN
Di Ranah
PERTANIAN



Penerbit Ar-Rahmah
Bogor 2007

Valeriana Darwis

Lukisan Kemiskinan di Ranah Pertanian

Cet-1 Bogor Ar-Rahmah

xviii + 113 hal 23,5 x 15,5 cm

ISBN 978-979-99001-8-0

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987:

- 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*
 - 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*
-

Judul

Lukisan Kemiskinan di Ranah Pertanian

Penulis

Valeriana Darwis

Disain Sampul

Karima Printing

Tata Letak

Miftah Tauhid

Penerbit

Ar-Rahmah

Jalan Tentara Pelajar No.BB-5 Bogor

Telepon : (0251)351527

Cetakan Pertama, Oktober 2007

All Right Reserved (Hak Cipta Dilindungi)

Kupersembahkan Buku Ini
Kepada Elemen Bangsa Yang Tulus
Memperjuangkan
Pengentasan Kemiskinan
Dan
Kepada Anak Bangsa
Yang Tengah Berusaha Keluar
Dari Belenggu Kemiskinan

Kata Pengantar

Oleh: Dr. Poempida Hidayattulloh
(Pengurus KADIN)

Buku Kemiskinan di Ranah Pertanian ini membahas masalah kemiskinan di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat pertanian. Masalah kemiskinan di lingkungan pertanian memang agak unik sifatnya, sehingga perlu dibahas secara tersendiri. Masalahnya sebagian besar penduduk Indonesia terdiri dari orang tani dan ekonomi kita masih didominasi oleh pertanian. Menyadari hal itu, pemerintah kita selalu menyusun program pembangunan lima tahunan, semenjak awal sampai sekarang dengan titik beratnya pada pertanian. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kondisi para petani kita masih tetap miskin, boleh dikatakan tidak ada kemajuan dalam hal tingkat kesejahteraan hidup mereka. Program pembangunan pertanian yang telah berhasil meningkatkan produksi berbagai komoditas utama, tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan petani, atau tingkat kesejahteraan petani.

Peningkatan harga beberapa produksi pertanian pun tidak selalu berakibat kepada peningkatan pendapatan petani. Sudah umum diketahui bahwa para petani padi di hamparan sawah pantai Utara Jawa, sebagian hanyalah buruh tani, dan sebagian lainnya sudah terjerumus ke dalam praktek ijon. Padahal sudah dijual selagi masih menguning di sawah. Jadi kebijakan meningkatkan harga gabah setelah panen belum tentu akan meningkatkan pendapatan petani. Demikian juga dengan tanaman perkebunan seperti cengkeh.

Berapa banyak biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan program peningkatan produksi pertanian. Berapa banyak biaya yang dihabiskan untuk menaikkan harga dasar pada waktu panen. Perlu diteliti kemana perginya dampak dari program tersebut, apakah ada manfaatnya untuk petani, atau malah untuk yang lain. Sebagai contoh, pemerintah pernah menggebu-gebu berusaha meningkatkan produksi cengkeh. Pada waktu panen cengkeh meningkat tak ada yang beli, sampai harga jatuh menjadi sangat rendah sekali. Pabrik-pabrik rokok punya stok untuk 3 – 4 tahun, sementara petani cengkeh perlu uang *cash* dalam waktu dekat. Lalu siapa sebenarnya yang menikmati program peningkatan produksi cengkeh itu? Demikian juga dengan komoditi lainnya. Persatuan di antara orang-orang yang bergerak di bidang *manufacturing* dan *marketing* jauh lebih kuat dari pada persatuan petani.

Bung Hatta pernah menulis pada satu harian yang terbit di Bandung pada tahun 1928, (80 tahun yang lewat) dimana beliau mensinyalir bahwa petani kita hanya bisa menghasilkan, sementara *processing* dan *marketing* ada di tangan orang lain, kadang-kadang kita beli kembali barang yang telah kita produksi. Sampai sekarang keadaan petani kita masih seperti itu.

Buku ini mencoba membahas masalah kemiskinan di ranah pertanian, terutama dengan mengemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Walaupun kajiannya masih terbatas pada tanaman pangan dan tanaman perkebunan, belum termasuk perikanan dan peternakan, namun pembahasan dalam buku ini mungkin dapat dipedomani dalam rangka penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis juga mengemukakan berbagai saran untuk pengentasan kemiskinan di masa yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2007

Prakata Penulis

*K*emiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Kemiskinan merupakan salah satu kasta yang paling rendah dalam kehidupan sosial masyarakat dan sampai kapanpun kemiskinan ini tidak dapat dihilangkan, tetapi bisa dikurangi. Hal ini menggambarkan masih banyak jumlah penduduk miskin di negara kita, pada hal sudah banyak program-program pemerintah yang mengarah pada pengentasan kemiskinan. Program-program untuk memberdayakan kaum papa hampir ada di setiap departemen, dan yang lebih khusus menanganinya adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Dari sejak Indonesia merdeka jumlah penduduk miskin selalu berubah-ubah dan banyaknya penduduk miskin ini juga merupakan salah satu indikator keberhasilan dari satu pemerintahan. Sehingga tidaklah heran jumlah penduduk miskin merupakan salah satu komoditas politik dan efek bagi departemen untuk menjawab tantangan politik tersebut, adalah membuat proyek yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan.

Salah satu departemen yang konsisten melihat kemiskinan adalah Departemen Pertanian, keseriusan ini didasari dari kalangan yang paling banyak menjadi anggota dari kelompok miskin ini adalah pelaku-pelaku yang bergerak di sektor pertanian, khususnya petani dan buruh tani. Agar terlihat lebih mengerucut, maka buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian

yang pernah dilakukan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, yang merupakan salah satu eselon II dilingkup Departemen Pertanian.

Buku ini tentunya masih banyak kekurangan serta potret dari kemiskinan itu sendiri sangat luas, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan kritikan dari pembaca. Dan harapan penulis, semoga buku ini dapat membuka wawasan tentang kemiskinan yang ada di pertanian dan selanjutnya bisa dipergunakan sebagai input dalam kontribusi pembuat kebijakan pengentasan kemiskinan di negara kita.

Bogor, 2007

Penulis

<http://serverlib/psekp/>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PRAKATA PENULIS	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
PENDAHULUAN	1
BAB 1 Keragaan Politik Penyebab Kemiskinan	5
BAB 2 Kemiskinan di Mata Pengamat	11
BAB 3 Kemiskinan di Sub Sektor Tanaman Pangan	20
3.1. Potret Desa	21
3.2. Keragaan Sumber Daya Manusia	24
3.3. Sumber Pendapatan	30
3.3.1. Pertanian.....	30
3.3.2. Berburuh Tani.....	34
3.3.3. Usaha Industri Rumah Tangga dan Jasa.....	35
3.3.4. Berburuh Non Pertanian	35
3.3.5. Sumber Pendapatan Lainnya	35
3.4. Aktivitas Waktu Kerja	36
3.5. Proporsi Pendapatan Menurut Sumber	37
3.6. Kesimpulan dan Saran	39

BAB 4 Kemiskinan di Sub Sektor Perkebunan	44
4.1. Kelapa sawit	49
4.1.1. Desa Sumber Rejeki	50
4.1.2. Desa Nusa Serasan	55
4.2. Karet.....	57
4.2.1 Desa Tanjung Laut	58
4.2.2. Desa Pulau Rajak	59
4.3. Kesimpulan dan Saran	61
BAB 5 Program Pengentasan Kemiskinan	62
Jaring Pengaman Sosial (JPS)	63
5.1. Jawa Timur	64
5.1.1. Karakteristik Keluarga Miskin	65
5.1.1.1. Pendidikan	65
5.1.1.2. Lapangan Pekerjaan	65
5.1.2. Partisipasi dan Respon Masyarakat	
Terhadap Program.....	67
5.1.2.1. Partisipasi	67
5.1.2.2. Respon	68
5.1.3. Penilaian Masyarakat Terhadap Manfaat dan	
Pelaksanaan Program	70
5.1.4. Harapan Masyarakat Terhadap	
Pelaksanaan Program Selanjutnya	71
5.1.5. Kesimpulan dan Saran	72
5.2. Lampung	73
5.2.1. Karakteristik Rumah Tangga Petani	73
5.2.1.1. Angkatan Kerja dan Proporsi Anggota	
Keluarga Yang Bekerja	73
5.2.1.2. Distribusi Anggota Rumah Tangga Menurut	
Tingkat Pendidikan	74

5.2.1.3. Distribusi Anggota Rumah Tangga Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Sampingan	76
5.2.1.4. Penguasaan Aset Lahan Pertanian.....	78
5.2.2. Respon Masyarakat Terhadap Program JPS	79
5.2.3. Penilaian Masyarakat Terhadap Manfaat dan Pelaksanaan Program JPS	81
5.2.4. Harapan Masyarakat Terhadap Program JPS	84
5.2.5. Kesimpulan dan Saran	85
Transmigrasi	86
BAB 6 Saran Pengentasan Kemiskinan Masa Depan	90
6.1. Pemerintah	92
6.1.1. Himbauan Program Pengentasan Kemiskinan	93
6.1.1.1. Tumpang Tindih	94
6.1.1.2. Data	97
6.2. Masyarakat	103
6.2.1. Himbauan Program Pengentasan Kemiskinan	104
6.2.1.1. Tokoh Politik	104
6.2.1.2. Pengusaha	106
6.2.1.3. Tokoh Agama	108
6.3. Individu	110
6.3.1. Himbauan Program Pengentasan Kemiskinan	111
DAFTAR BACAAN	xiv
TENTANG PENULIS	xviii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	26
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	26
Tabel 3.3.	Luas Tanah Menurut Peruntukan	27
Tabel 3.4.	Rataan Pemilikan Aset Lahan Pada Rumah Tangga Responden	29
Tabel 3.5.	Proporsi Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber	38
Tabel 3.6.	Kegiatan dan Sumber Pendapatan Rumah Tangga Dalam Usaha Berburuh dan Lainnya (HOK, Rataan).....	41
Tabel 3.7.	Kegiatan dan Sumber Pendapatan Rumah Tangga Dalam Usaha Berburuh dan Lainnya (HOK, Desa Growok).....	41
Tabel 3.8.	Kegiatan dan Sumber Pendapatan Rumah Tangga Dalam Usaha Berburuh dan Lainnya (HOK, Desa Drokilo).....	42
Tabel 3.9.	Kegiatan dan Sumber Pendapatan Rumah Tangga Dalam Usaha Berburuh dan Lainnya (Rp, Rataan)	42
Tabel 3.10.	Kegiatan dan Sumber Pendapatan Rumah Tangga Dalam Usaha Berburuh dan Lainnya (Rp, Desa Growok)	43
Tabel 3.11.	Kegiatan dan Sumber Pendapatan Rumah Tangga Dalam Usaha Berburuh dan Lainnya (Rp, Desa Drokilo)	43
Tabel 4.1.	Potongan Yang Ditanggung Setiap Anggota di Kelompok Tani	53
Tabel 4.2.	Produksi Kelapa Sawit di Desa Sumber Rejeki.....	54
Tabel 4.3.	Produksi Kelapa Sawit di Desa Nusa Serasan	60
Tabel 5.1.	Distribusi Anggota Rumah Tangga Menurut	

	Klas Tingkat Pendidikan.....	65
Tabel 5.2.	Persentase Rumah Tangga Miskin	
	Menurut Sumber Penghasilan.....	67
Tabel 5.3.	Distribusi Anggota Rumah Tangga	
	Menurut Jenis Kegiatan Utama	67
Tabel 5.4.	Alasan Masyarakat Berpartisipasi Mengikuti Program	69
Tabel 5.5.	Sumber Informasi Tentang Program	70
Tabel 5.6.	Harapan Masyarakat Mengenai Program	
	Pengentasan kemiskinan	72
Tabel 5.7.	Angkatan Kerja dan Proporsi Angkatan Kerja.....	74
Tabel 5.8.	Persentase Distribusi Anggota Rumah Tangga	
	Menurut Pendidikan	75
Tabel 5.9.	Persentase Distribusi Anggota Rumah Tangga	
	Menurut Pekerjaan	77
Tabel 5.10	Persentase Jumlah Kegiatan Sampingan	77
Tabel 5.11	Penguasaan Aset Lahan Pertanian	78
Tabel 5.12.	Alasan Masyarakat Berpartisipasi Mengikuti Program	79
Tabel 5.13.	Sumber Informasi Tentang Program JPS	81
Tabel 5.14.	Persepsi Masyarakat Terhadap Program JPS	82
Tabel 5.15.	Masalah Yang Dirasakan Masyarakat	
	Dalam Mengikuti Program JPS.....	84
Tabel 5.16.	Harapan Masyarakat Mengenai Program JPS.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Struktur Organisasi KUD Suka Rejeki	52
Gambar 6.1.	Program Pengentasan Kemiskinan Sektor Pertanian	96
Gambar 6.2.	Diagram Jalur Pengumpulan Data dan Informasi	102
Gambar 6.3.	Konsep Dasar Virtual Private Network	103
Gambar 6.4.	Skema Investasi Politik di Sektor Pertanian	106

PENDAHULUAN

Kemiskinan mengkondisikan dimana seseorang, sejumlah atau segolongan orang berada dalam tingkatan kekurangan dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang layak berlaku dimasyarakat. Kemiskinan juga bisa diartikan sebagai suatu kondisi dimana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya menurut standar minimal, misalnya tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi minimal, tidak mampu mengikuti pendidikan dasar, tidak mampu memperoleh pelayanan kesehatan serta tidak dapat berperan wajar dalam interaksi sosial dalam masyarakat lingkungannya.

Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang terus menerus dihadapi bangsa ini. Semenjak bangsa ini mengukuhkan kemerdekaannya hingga berkali-kali terjadinya pergantian kepala negara beserta jajarannya, persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Berbagai peristiwa membuktikan hal ini, antara lain munculnya rawan pangan, beragam peristiwa kelaparan di berbagai daerah, semakin membludaknya pencari kerja sementara lapangan kerja sangat terbatas, berbagai keluhan merosotnya daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari dan dampak dari bencana alam.

Membicarakan tentang kemiskinan penduduk tampaknya masih menjadi masalah pelik yang harus terus mendapatkan perhatian serta penanganan serius dan transparan. Kemiskinan tidak dapat ditakar hanya dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan makan tiga kali sehari. Kemiskinan mempunyai banyak wajah. Ia lebih dari sekedar pendapatan yang rendah, tetapi juga merefleksikan kondisi pendidikan dan kesehatan yang buruk, kemerosotan dalam ilmu pengetahuan dan komunikasi, ketidakmampuan menegakkan hak-hak asasi manusia dan politik, serta tidak adanya kehormatan, kepercayaan dan harga diri.

Sebelum terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, Indonesia telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk masyarakat pedesaan dan masyarakat pertanian. Keberhasilan tersebut diakui bukan hanya dalam hal peningkatan pendapatan tapi juga dalam hal pengurangan jumlah penduduk miskin (Pakpahan, *dkk.* 1995). Selama periode antara tahun 1970 dan 1980-an, Indonesia telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 65 persen menjadi 17 persen (BPS 1993). Prestasi ini merupakan hasil dari proses yang dilakukan sejak lama.

Pertumbuhan sektor pertanian dalam periode tahun 1970-an dan tahun 1980-an cukup tinggi, mencapai di atas 3,8 persen pertahunnya. Puncak keberhasilan pembangunan pertanian dalam periode tersebut ditandai antara lain, oleh pencapaian swasembada beras tahun 1984. Sekitar 70 persen kenaikan produksi beras disebabkan oleh kenaikan produktivitas lahan (*Green Revolution*). Kondisi ini berhasil menurunkan angka kemiskinan di pedesaan dengan cukup tajam, yaitu dari sekitar 45 persen di awal tahun 1970-an menjadi 14 persen di tahun 1990 dan menjadi 12 persen tahun 1996 (Kasryno, *dkk.* 2000).

Keberhasilan pembangunan pertanian dalam periode 1970-an dan 1980-an ini antara lain disebabkan oleh kebijakan ekonomi makro dan mikro sangat mendukung pembangunan sektor pertanian. Hal ini direpresentasikan dari alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pertanian pada periode sampai dengan PELITA IV cukup tinggi dengan rata-rata 9,5 persen, sedangkan rata-rata 40 negara berkembang pada periode tersebut hanya mencapai 7,5 persen (Word Bank. 1992). Akibat keterbatasan dana, maka pemerintah mulai dari PELITA IV anggaran di sektor pertanian diturunkan dari 8,7 persen menjadi 5,5 persen pada PELITA V dan turun lagi menjadi 3,6 persen pada PELITA VI. (Word Bank. 1996).

Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan akselerasi penduduk miskin kembali meningkat dengan cepat. Akhir tahun 1998, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 49,5 juta jiwa, 17,6 juta jiwa terdapat di perkotaan dan selebihnya yaitu 31,9 juta di antaranya terdapat di pedesaan. Lebih lanjut data BPS tahun 2001 menunjukkan bahwa dari sekitar 38,4 juta

penduduk miskin di Indonesia, 65 persen di antaranya berada di pedesaan dan dari jumlah tersebut 82 persen di antaranya bekerja di sektor pertanian.

Bank dunia sangat serius dalam hal mengurangi penduduk miskin, termasuk di negara Indonesia. Dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia tidak semuanya berjalan dengan semestinya, banyak laporan memperlihatkan bahwa program tersebut mengalami mis manajemen yang sangat signifikan dan para penerima paket program pengentasan kemiskinan tersebut menganggap bantuan tersebut sebagai sedekah yang tidak perlu dipertanggungjawabkan (Yusdja *dkk.* 2003).

Sudah banyak program pengentasan penduduk miskin yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Pada masa orde baru dikenal dengan program delapan jalur pemerataan dengan maksud pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan sampai ke pelosok pedesaan agar menyentuh petani miskin di pedesaan. Tahun 1990-an ada program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Jaring Pengaman Sosial untuk mengatasi keluarga yang terkena dampak krisis ekonomi dan program mengurangi beban orang miskin akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pada masa sekarang pemerintah tidak lagi mempunyai dana cukup dan bantuan duniapun menurun sehingga program-program pengentasan kemiskinan sangat berkurang. Tidak ada pilihan bagi keluarga dan petani miskin, pengentasan kemiskinan tidak sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah saja, melainkan juga dari keseriusan keluarga dan petani miskin untuk berusaha terus keluar dari himpitan kemiskinan itu sendiri. Saat ini, tiga pilar utama yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan, petani atau keluarga miskin sebagai pemanfaat program dan masyarakat sebagai pendukung kegiatan program harus bersinergi, serta bahu membahu dalam usaha pengentasan kemiskinan.

Begitu universalnya kemiskinan ini baik dari penyebab sampai ke program pengentasannya, maka buku ini lebih difokuskan pada ulasan kemiskinan di sektor pertanian saja. Sementara itu di sektor pertanian sendiri pun tentang kemiskinan ini sangat luas juga ulasan

dan bahasannya, untuk itu buku ini kembali difokuskan kepada temuan-temuan hasil kajian yang pernah dilakukan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian. Dari hasil kajian tersebut buku ini mencoba memberikan saran untuk kebijakan pengentasan kemiskinan ke depan, khususnya yang berhubungan dengan pemerintah, masyarakat dan individu. 📖

<http://serverlib/psekp/>